Serahkan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, Pj. Bupati Pasuruan Minta Camat Awasi Pengelolaan Keuangan Desa

Rabu, 21 Februari 2024

Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, meminta Camat untuk mengawasi pengelolaan keuangan Desa terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pengawasan meliputi evaluasi APBDes, pengelolaan keuangan Desa, aset Desa, dan laporan pertanggungjawaban APBDes. Tujuannya agar pemanfaatan BKK tepat sasaran dan transparan.

Pj. Bupati Andriyanto menekankan pentingnya pengelolaan keuangan Desa yang tertib dan sesuai aturan. Ia mengingatkan bahwa dana BKK merupakan uang negara, bukan uang pribadi, dan harus digunakan secara bertanggung jawab untuk kemajuan Desa.

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan menyalurkan BKK senilai Rp 15.897.500.000 kepada 111 Desa. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa, seperti pagar makam, gapura, kantor Desa, balai Desa, dan pasar Desa.

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan signifikan dalam status Desa dari tahun 2018 hingga 2023. Terdapat 85 Desa Mandiri, 173 Desa Maju, dan 0 Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2023.

Penyaluran BKK diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan status Desa dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.